

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

A. Pengaruh Pendidikan, Inklusi Keuangan, dan Digitalisasi secara Parsial terhadap Keputusan Berwirausaha

1. Pendidikan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan berwirausaha generasi milenial di Sumatera Barat dengan pola *non-linear* yang membentuk kurva U-terbalik. Generasi milenial dengan latar belakang pendidikan dasar hingga menengah (SD sampai SMA/ sederajat) memiliki kecenderungan berwirausaha yang lebih tinggi. Sebaliknya, kelompok yang menamatkan pendidikan tinggi (Diploma dan S1/S2/S3) justru memiliki kecenderungan berwirausaha yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan kelompok lainnya.
2. Inklusi Keuangan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan berwirausaha generasi milenial di Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi akses keuangan formal, baik berupa kepemilikan tabungan, penggunaan jasa keuangan, maupun penerimaan kredit, belum menjadi determinan utama yang membedakan keputusan milenial untuk memilih jalur wirausaha dibandingkan bekerja di sektor formal.
3. Digitalisasi secara parsial menunjukkan arah pengaruh yang heterogen terhadap keputusan berwirausaha generasi milenial di Sumatera Barat. Pemanfaatan teknologi digital berupa penggunaan *e-commerce* terbukti berpengaruh positif dan signifikan dalam mendorong keputusan berwirausaha. Sebaliknya, penggunaan *e-banking* berpengaruh negatif secara signifikan, sementara infrastruktur dasar seperti kepemilikan telepon seluler dan penggunaan internet secara umum tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan tersebut.

B. Pengaruh Pendidikan, Inklusi Keuangan, dan Digitalisasi secara Simultan terhadap Keputusan Berwirausaha

1. Pendidikan, inklusi keuangan, dan digitalisasi secara simultan (bersama-sama) terbukti berpengaruh signifikan terhadap keputusan berwirausaha generasi milenial di Sumatera Barat. Ketiga faktor ini secara kolektif berkontribusi dalam membentuk rasionalitas ekonomi generasi milenial saat mengevaluasi dan mengambil keputusan untuk berwirausaha, di mana secara keseluruhan model mampu menjelaskan klasifikasi keputusan wirausaha dengan tingkat ketepatan yang memadai.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi kebijakan dan saran praktis yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah (Pemda):

Merumuskan program kewirausahaan yang membidik dua segmen berbeda secara terpisah. Segmen pertama adalah milenial berpendidikan rendah hingga menengah (SD–SMA) yang sudah cenderung berwirausaha, namun memerlukan peningkatan kualitas usaha melalui pelatihan manajemen, pendampingan, sertifikasi halal/PIRT, dan kemudahan akses pasar. Segmen kedua adalah milenial berpendidikan tinggi (Diploma dan Sarjana) yang cenderung menghindari kewirausahaan, sehingga memerlukan dorongan program kewirausahaan berbasis teknologi dan inovasi (*technopreneurship*) yang mampu memberikan utilitas ekspektasi setara atau lebih tinggi dibandingkan pekerjaan formal.

Memperkuat program digitalisasi UMKM dengan fokus pada adopsi *e-commerce*, mengingat penggunaan *e-commerce* terbukti kuat secara empiris mampu meningkatkan probabilitas berwirausaha sebesar 51,6 persen. Program konkret yang diusulkan meliputi pelatihan pemasaran digital, *onboarding* ke *platform marketplace* nasional (Tokopedia, Shopee, TikTok Shop), pendampingan pembuatan konten produk, dan pemfasilitasan alur logistik, khususnya untuk wilayah perdesaan.

Mengatasi kesenjangan digital antara wilayah perkotaan (terutama Kota Padang dan Bukittinggi) dengan wilayah perdesaan di kabupaten/kota lainnya melalui perluasan infrastruktur akses internet, literasi digital berbasis komunitas, dan subsidi perangkat pendukung untuk pelaku UMKM di perdesaan.

2. Bagi Lembaga Pendidikan Tinggi:

Lembaga pendidikan tinggi di Sumatera Barat perlu merancang ulang kurikulum kewirausahaan agar lebih aplikatif dan berorientasi pada peluang bisnis riil (*opportunity entrepreneurship*) dibandingkan sekadar penyampaian teori di kelas.

Memperluas program inkubator bisnis kampus, memfasilitasi akses pendampingan (*mentoring*) dari wirausahawan sukses, dan menjalin kemitraan dengan ekosistem *startup* digital nasional. Pengalaman langsung di sektor *digital entrepreneurship* ini diharapkan mampu menurunkan hambatan maupun biaya peluang (*opportunity cost*) berwirausaha bagi para lulusan Diploma dan Sarjana.

3. Bagi Lembaga Keuangan dan Otoritas Terkait:

Kebijakan inklusi keuangan hendaknya tidak sekadar berfokus pada perluasan akses dan kepemilikan rekening, melainkan diarahkan pada peningkatan pembiayaan yang bersifat produktif. Penyaluran program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Mekaar, dan pembiayaan mikro lainnya harus lebih mudah diakses dan senantiasa disertai dengan pendampingan teknis guna menjamin ketersediaan dana menjadi modal usaha yang berkesinambungan.

Lembaga keuangan daerah didorong untuk mengembangkan instrumen/skema pembiayaan khusus yang mengintegrasikan modal sosial dan jaringan perantauan (kekerabatan) yang menjadi ciri khas wilayah Sumatera Barat, misalnya pengembangan instrumen *diaspora bond*.

Mendorong perbankan agar mengintegrasikan fasilitas *e-banking* dengan kemudahan akses layanan modal kerja (*working capital*) terpadu. Tujuannya agar *e-banking* tidak lagi sebatas alat transaksi konsumtif atau pembayaran *payroll* para

pekerja formal, tetapi juga benar-benar dimanfaatkan sebagai gerbang akses layanan produktif wirausaha.

